

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Meskipun memiliki riwayat yang cukup panjang pada masa lalu, dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dengan Belanda sudah memiliki ikatan persahabatan yang cukup erat di berbagai aspek bidang sejak dari lama. Ikatan yang baik tersebut telah memasuki tingkat kerjasama menyeluruh atau *Comprehensive Partnership* dengan cakupan kemitraan yang lebih luas. Hubungan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda ini disebut dengan kerjasama Internasional yang merupakan cerminan dari adanya Politik Internasional. Pada masa lalu, kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda terbangun atas dasar peran sebagai negara penerima dan negara pendonor. Namun seiring berjalannya pertumbuhan ekonomi yang stabil, hubungan kedua negara juga mencakup kerja sama trilateral dalam konteks pembanguinan bersama negara lain di mana Indonesia mempunyai potensi untuk dapat membantu negara lain yang juga membutuhkan.

Dengan adanya kerjasama yang terjalin diharapkan mampu menguntungkan satu sama lain karena beberapa kebutuhan tidak bisa dipenuhi oleh suatu negara, maka dari itu sangat perlu diadakannya kerja sama antar negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Perlu adanya jembatan pemangku kepentingan antara dua pihak yang mana hal tersebut merupakan prinsip dari adanya hubungan bilateral. Untuk membangun hubungan bilateral, perlu membangun hubungan diplomatik. Dengan kata lain, kedua negara harus menyadari keberadaan negara lain. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komunike bersama dan selanjutnya pengiriman duta besar dari masing-masing negara.

Namun, begitu banyaknya kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dunia internasional, interaksi yang dilakukan untuk menjawab setiap persoalan yang ada tidak hanya dilakukan oleh negara (*State Actor*) saja, meskipun memang negara menjadi faktor utama tetapi aktor-aktor lainnya (*Non-State Actor*) juga mempunyai andil yang cukup penting dalam menjalin hubungan antar negara (Luisiana, 2018). Tidak jarang banyak negara lebih mengedepankan diplomasi tradisonal dengan mekanisme Pemerintah ke Pemerintah *Government to Government (G2G) relations* padahal ada diplomasi jenis lain seperti diplomasi publik yang menekankan kepada *Government to People* atau bahkan *people to people* yang biasa disebut dengan istilah *second track diplomacy* yang didefinisikan sebagai upaya

diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen *non-government* seperti media massa, kaum akademisi, kelompok masyarakat, lembaga, dan individu.

Diplomasi orang ke orang (*people to people diplomacy*) sudah tidak asing lagi untuk didengar, hal tersebut dikarenakan diplomasi dengan bentuk ini banyak digunakan dan hampir melibatkan semua kalangan dalam hubungan internasional. *People to People Diplomacy* menjadi konsep yang sangat penting bagi hubungan antar negara terlebih lagi bagi pemerintah yang selalu mendapatkan berbagai tantangan dalam masalah-masalah diplomasi yang setiap waktu semakin kompleks. Berbeda dengan diplomasi pemerintah yang selalu dilakukan dengan cara formal, atau kaku bahkan memakan biaya yang cukup tinggi, dengan *people to people diplomacy* ini dapat meningkatkan aktivitas diplomasi dengan cara yang lebih fleksibel, transparan, terbuka dengan kritik dan lebih efektif serta dapat memberikan dampak yang luas dan sangat besar terhadap masyarakat internasional (Robison, 2018).

People to People Diplomacy terlihat digunakan dalam hubungan Indonesia dan Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara yang memiliki hubungan kelim pada masa lalu karena peristiwa penjajahan yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia membuat hubungan kedua negara mengalami pasang surut. Akibat peristiwa tersebut, citra Belanda di mata masyarakat Indonesia masih belum begitu baik. Setelah 80 tahun kejadian tersebut terjadi, Belanda baru mau meminta maaf atas kekerasan ekstrem yang pernah dilakukannya. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 setelah adanya studi penelitian terbaru yang berjudul “Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia, 1945-1950” dikeluarkan hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 mengungkapkan bahwa pemerintah dan militer Belanda memang melakukan kekejaman dan kekerasan ekstrem dan sistematis di Indonesia (BBC, 2022).

Belanda menjalin hubungan kerja sama dengan Indonesia selain untuk memperbaiki citranya di mata pemerintah dan masyarakat Indonesia, juga karena Belanda membutuhkan Indonesia. Indonesia dianggap berperan dalam keamanan di Asia Tenggara dengan menjadi anggota G20 dan anggota terkemuka di ASEAN. Indonesia dianggap mempunyai peran penting dalam kepemimpinan karena Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan salah satu ekonomi terbesar di Asia. Dalam pandangan Belanda, Indonesia dianggap mampu untuk bisa menata dunia internasional sesuai aturan. Peran Indonesia dimanfaatkan Belanda untuk mampu menjangkau pasar ASEAN. Begitupun sebaliknya, adanya Belanda dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama dalam berbagai bidang yang bisa menguntungkan kedua negara.

Namun, untuk mampu menjaga hubungan tersebut, diperlukan andil dari seluruh elemen tidak hanya diplomasi yang dilakukan secara formal oleh pemerintah saja, tetapi seluruh elemen masyarakat juga harus ikut serta dalam menjaga dan mempertahankan hubungan tersebut dimasa yang akan datang maka perlu dilakuskannya *people to people diplomacy*. Upaya *people to people diplomacy* ini dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang baik terhadap Belanda dan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Hubungan bilateral antara negara lebih banyak menggunakan diplomasi tradisional yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi. Maka perlu adanya peran dan kontribusi dari *people to people diplomacy* untuk mampu melengkapi aktivitas diplomasi tradisional Indonesia dengan Belanda.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis masalah, maka peneliti akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik yang dilakukan *people to people diplomacy* melalui program Studeren in Netherland (StuNed) dalam implementasi Hubungan Bilateral Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat *people to people diplomacy* melalui program Studeren In Netherland (StuNed) terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Belanda?
3. Bagaimana dampak peran *people to people diplomacy* terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dalam Program *Studeren in Netherland* (Stuned)?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang:

- 1) Praktik *People to People Diplomacy* (*Second Tarck Diplomacy*) dalam hubungan bilateral Indonesia-Belanda melalui kerjasama yang telah dibangun yaitu *Studeren In Netherland* (StuNed).
- 2) Faktor pendukung dan penghambat dari praktik yang dilakukan *people to people diplomacy* melalui program studeren in netherland (Stuned)
- 3) Dampak terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda melalui praktik yang dilakukan oleh *people to people diplomacy* dalam program *Studeren In Netherland* (StuNed)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Kegunaan bagi peneliti adalah untuk mengaplikasikan ilmu atau teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan memberikan kontribusi berupa ide-ide bagi pengembangan Ilmu Politik khususnya yang berkaitan dengan Politik Internasional dan Hubungan Bilateral Indonesia-Belanda.
- b. Memberikan kontribusi konseptual bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi, Sebagai bahan rujukan dan tambahan informasi bagi proses belajar mengajar dan perkuliahan di jurusan Ilmu Politik khususnya Konsentrasi Politik Internasional dengan pembahasan Hubungan Bilateral Indonesia dengan Belanda.
- b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dengan adanya ruang lingkup dan batasan penelitian bertujuan untuk membatasi pembahasan dan menentukan konsep permasalahan pada pokok penelitian sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dengan mudah dimengerti dan tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam penginterpretasian hasil penelitian.

Ruang Lingkup dan Batasan penelitian ini berfokus kepada peranan dari *People To People Diplomacy* yang dilakukan oleh aktor non-negara atau non-pemerintah yaitu seperti Nuffic Neso Indonesia sebagai *Non-Governmental Organisation*, Mahasiswa Indonesia yang sedang melaksanakan studi di Belanda, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda dan Ikatan Alumni Stuned sebagai praktik yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Belanda.